

Per 70/01
Mus
u

SKRIPSI

IMELDA MEIRANIA MUSTIKASARI

UPAYA HUKUM BANK DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET DARI DEBITUR

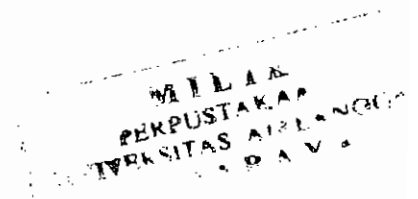


MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

UPAYA HUKUM BANK DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET DARI DEBITUR

SKRIPSI



DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM UNTUK MEMENUHI
SYARAT - SYARAT MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Moerdiati", written over a horizontal line.

Hj. Moerdiati, S.H., M.S.

NIP. 130 287 031

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Imelda", written over a horizontal line.

Imelda Meirania Mustikasari

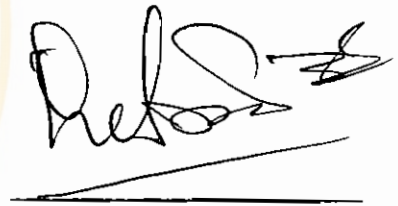
NIM. 039714526

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

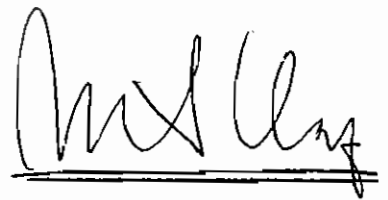
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada tanggal 8 Agustus 2001

Tim Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.



Anggota 1. Hj. Moerdiati Soebagyo, S.H., M.S



2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Hak yang dimiliki bank untuk menyelesaikan kredit macet adalah :

- Secara administrasi perkreditan, yaitu dengan rescheduling, reconditioning dan restructuring.
- Melalui Lembaga-Lembaga Penyelesaian Kredit Macet, yaitu :
 1. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
 2. Badan Peradilan.
 3. Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- Melalui Lembaga Paksa Badan yang ditujukan untuk debitur yang beritikad tidak baik.

● Gijzeling yang ditujukan bagi debitur yang betul-betul tidak mampu untuk membayar utangnya dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan karena telah merampas kebebasan bergerak bagi debitur yang miskin.

b. Hambatan-hambatan yang dialami Bank dalam menyelesaikan kredit macet adalah :

- Ulah dari debitur sendiri, yaitu debitur tidak mau memenuhi panggilan dari BUPLN, dan sebagainya.

- Berkaitan dengan Proses Pengadilan, yaitu berkaitan dengan waktunya yang terlalu berlarut-larut.
- Campur tangan dari Mahkamah Agung dengan mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Berkaitan dengan Eksekusi Grosse Akta Perjanjian kredit ex Pasal 224 HIR karena adanya perbedaan penafsiran dalam pasal tersebut.
- Eksekusi barang jaminan ditempuh sebagai alternatif terakhir, jika restrukturisasi tidak dapat dilakukan / tidak berhasil dan penjualan dibawah tangan juga tidak mungkin dilakukan.

2. Saran

- a. Hendaknya persidangan betul-betul baru ditempuh sebagai jalan yang terakhir, jika ternyata memang sudah tidak memungkinkan bagi debitur untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada kreditur. Untuk Lembaga penyanderaan / Gijzeling, sebaiknya ditiadakan saja karena hal ini akan percuma dan tidak membawa keuntungan bagi pihak kreditur yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur yang miskin dalam membayar utangnya.
- b. Hendaknya Pengadilan Negeri tidak menerima campur tangan dari Mahkamah Agung dalam hal penanganan penyelesaian kredit macet yang diserahkan oleh kreditur kepada Pengadilan Negeri, karena hal ini akan